



Available online at **HISTORIA**; Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah
Journal homepage: <https://ejournal.upi.edu/index.php/historia>



RESEARCH ARTICLE

“Preanger Planters”: Kiprah Raja Teh Priangan 1862 - 1942

Syarah Nurul Fazri, Wawan Darmawan

Pendidikan Sejarah, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia

Correspondence Author: syarahnurul20@upi.edu

To cite this article: Fazri, S.N., & Darmawan, W. (2025). “Preanger Planters”: Kiprah Raja Teh Priangan 1862-1942. *HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 8(1), 15-28. <https://doi.org/10.17509/historia.v8i1.81068>.

Naskah diterima : 3 Maret 2025, Naskah direvisi : 7 April 2025, Naskah disetujui : 30 April 2025

Abstract

Private entrepreneurs could cultivate the leased land after the 1870 Agrarian Law was enacted in Priangan. One of the Priangan plantation entrepreneurs is a descendant of Willem van der Hucht, namely Holle, Kerkhoven, and Bosscha. In the early 20th century, Holle, Kerkhoven, and Bosscha developed tea plantations in the Priangan region, and they became the new rich people of the plantations. The emergence of new rich people as investors supported the development of colonial modernity in the area around plantations. This paper seeks to see the socio-economic situation around plantations in Priangan and the role of Holle, Kerkhoven, and Bosscha in Priangan by using historical methods, namely heuristic, criticism, interpretation, and historiography. This study seeks to show the work of Willem van der Hucht's planter family in Priangan. Kerkhoven, Holle, and Bosscha show their work in education, social technological advancement, health, and the development of plantation economic cultivation in Priangan. The position of planters as owners of capital and plantations was strategic enough to drive government policies in the early 20th century. Thus, their work in advancing colonial modernity in Priangan is important in building a city's physical infrastructure and advancing sustainable colonial life.

Keywords: Bosscha; Holle; Kerkhoven; Preanger planters.

Abstrak

Pasca Undang-Undang Agraria 1870 diberlakukan di Priangan, pengusaha swasta memiliki keleluasaan dalam mengolah lahan yang disewa. Salah satu keluarga pengusaha perkebunan Priangan merupakan keturunan dari Willem van der Hucht, yakni Holle, Kerkhoven, dan Bosscha. Pada awal abad ke-20, Holle, Kerkhoven, dan Bosscha mengembangkan perkebunan teh di wilayah Priangan, sekaligus menjadi orang kaya baru dari perkebunan. Kemunculan orang kaya baru sebagai investor memberikan dukungan terhadap perkembangan modernitas kolonial di terutama wilayah sekitar perkebunan. Tulisan ini berupaya untuk melihat situasi sosial ekonomi di sekitar perkebunan di Priangan serta bagaimana peran Holle, Kerkhoven, dan Bosscha di Priangan. Dengan menggunakan metode sejarah yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Penelitian ini berupaya menunjukkan adanya kiprah keluarga planters Willem van der Hucht di Priangan. Kerkhoven, Holle, dan Bosscha menunjukkan kiprah mereka terhadap bidang-bidang pendidikan, sosial, kemajuan teknologi, kesehatan, serta pengembangan budidaya ekonomi perkebunan di Priangan. Posisi planters sebagai pemilik modal dan perkebunan cukup strategis untuk mendorong kebijakan-kebijakan pemerintah di awal abad ke-20. Dengan demikian, kiprah mereka dalam memajukan modernitas kolonial di Priangan memiliki kepentingan tidak hanya membangun fisik sebuah kota, namun juga memajukan kehidupan kolonial yang berkesinambungan

Kata Kunci: Bosscha; Holle; Kerkhoven; Preanger planters.

PENDAHULUAN

Pasca Undang-Undang Agraria 1870, pemerintah kolonial Hindia Belanda membuka kesempatan bagi investasi asing untuk menanamkan modal di tanah koloninya. Investasi asing tersebut mengubah peran pemerintah yang berperan secara monopolistik di perkebunan tanah kolonial. Adanya modal swasta mendorong orang-orang kaya Eropa untuk mengadu nasib di Hindia Belanda. Hal tersebut kemudian menumbuhkan golongan-golongan kaya baru di Hindia Belanda. Salah satu lahan perkebunan yang didominasi oleh investasi asing tersebut adalah wilayah Priangan. Wilayah Priangan memiliki suhu udaranya lebih sejuk karena berada pada ketinggian kurang lebih 500 sampai 1000 meter lebih di atas permukaan laut. Menurut para pemilik modal, Priangan cocok untuk komoditas perkebunan (Suganda, 2014).

Gambaran mengenai wilayah Priangan yaitu dataran tinggi dengan pemukiman penduduk yang sedikit dan hampir terletak di daerah aliran sungai. Sejak Priangan jatuh pada kekuasaan VOC pada 1705, penetrasi kolonial di Priangan menumbuhkan “cara hidup baru”. Banyak diantara penduduk yang sebelumnya menetap di aliran sungai dengan kemampuan hidup sederhana, dan tinggal berpindah-pindah dari satu wilayah ke wilayah lainnya, berubah menjadi penduduk yang tinggal menetap. Penduduk tersebut disebut sebagai petani tipar yang bercirikan memiliki hewan, mengolah lahan, dan memiliki tempat tinggal. Selain itu, para penduduk tersebut berada di bawah kekuasaan elit petinggi wilayah. Situasi kehidupan penduduk Priangan tersebut dimanfaatkan oleh VOC dengan kebijakan budidaya tanam kopi. Sistem tersebut mewajibkan para petani dan petingginya menyetorkan hasil budidaya kopi (Breman, 2014).

Sistem budidaya kopi yang telah dilakukan sejak masa VOC tetap berlanjut hingga sistem budidaya diperkenalkan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Adanya sistem budidaya menjadikan kopi tidak lagi menjadi satu-satunya tanaman budidaya di Priangan. Salah satunya tanaman budidaya yang diujicoba adalah tanaman teh. Namun, Pemerintah Kolonial Hindia Belanda mengalami kegagalan dalam uji coba tanaman teh sehingga menimbulkan kerugian (Bernard, 1978). Selain itu, tekanan perdebatan dalam eksploitasi ekonomi kolonial di Parlemen Belanda didominasi oleh golongan konservatif dan liberal. Kedua golongan ini berusaha untuk mengganti kebijakan-kebijakan penanaman yang bersifat eksploitatif. Keinginan golongan liberal yaitu dengan melibatkan swasta dalam mengelola aktivitas ekonomi kolonial, tidak hanya sebagai investor

melainkan juga terlibat sebagai eksekutor. Dalam sistem ini, kekuatan ekonomi tidak lagi bergantung pada pemerintah kolonial tetapi juga modal-modal asing (Furnivall, 2010).

Pada periode 1830-1870, merupakan periode berlakunya sistem budidaya yang dirancang oleh pemerintah kolonial. Dalam kebijakan ini, pemerintah kolonial mewajibkan penduduk Hindia Belanda untuk melakukan penyerahan wajib, terutama tanaman ekspor, untuk dijual kepada pemerintah kolonial. Dalam hal ini, keterlibatan pengusaha swasta berupa modal yang diinvestasikan pada lahan-lahan tertentu, sesuai ketentuan peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Pada 1854, kebijakan *Regeringreglement* memberi akses terhadap pengusaha swasta untuk menyewa lahan selama maksimal 20 tahun tanpa ada jaminan kredit. Hal tersebut tidak memberikan keleluasaan bagi pengusaha swasta untuk terlibat. Kemudian, pada 1862, Menteri Koloni dari kalangan liberal, G.H Uhlenbeck mengeluarkan peraturan lainnya bahwa orang Jawa yang memiliki tanah dapat menyewakan tanahnya kepada orang non-Jawa (Fasseur, 1991, hlm 35). Sistem penyewaan tanah menunjukkan pengusaha swasta terlibat sebagai eksekutor sejak sistem budidaya. Di Wilayah Priangan, salah satu investor swasta yang menyewa tanah adalah Adriaan Walraven Holle di Parakan Salak, dan Albert Holle di Sinagar, serta Cirohani pada 1862 (Bernard, 1978, hlm. 10).

Penyewa lahan di Priangan, yaitu Adriaan Walraven Holle dan Albert Holle merupakan salah satu marga yang berasal dari kakek-buyut Willem van der Hucht. Selain Holle, marga keluarga lain yang juga turut serta sebagai pengusaha swasta di Priangan adalah Kerkhoven dan Bosscha. Dalam tulisan ini, ketiga marga tersebut memiliki peranan penting di wilayah Priangan. Pengusaha swasta, khususnya orang Eropa yang datang untuk membuka perkebunan di wilayah Priangan disebut sebagai *preanger planters* (Kunto, 1986).

Preanger Planters adalah golongan pengusaha dan orang kaya “baru” dari perkebunan di Priangan. Status *preanger planters* dalam gambaran novel sejarah yang ditulis oleh Hella S. Haase (2014) berjudul “Sang Juragan Teh” mendeskripsikan bahwa mereka orang Eropa yang memiliki koneksi dengan pemerintah kolonial, sekaligus dapat “berteman” dengan pemerintah lokal seperti Bupati, Wedana, maupun kepala penghulu suatu wilayah setempat. Bupati atau pejabat tinggi di Priangan merupakan kalangan bangsawan yang disebut sebagai menak. Para bupati dan petinggi memiliki relasi dengan pengusaha-pengusaha perkebunan. Selain itu, para *planters* yang berusaha membuka perkebunan di

Priangan juga melakukan tindakan pertama mereka dengan menemui keluarga Holle. Keluarga Holle dinilai mengerti urusan dengan pemerintah lokal dan penduduk setempat (Lubis, 1998). Dengan demikian, hal tersebut menunjukkan bahwa pengusaha perkebunan di Priangan memiliki pengaruh “istimewa” dalam kelas-kelas sosial yang ada pada lapisan masyarakat Priangan.

Kebutuhan pemerintah terhadap modal serta maraknya pengusaha Belanda yang menginginkan investasi di Hindia Belanda mendorong akses sewa lahan yang lebih luas dan menjanjikan bagi para kaum pemodal yaitu dengan berlakunya UU Agraria 1870. Keterlibatan para *planters* dengan investasinya ini meningkatkan keuntungan para pengusaha perkebunan teh di awal abad ke-20. Pemilik modal dari Eropa ini beradu nasib di wilayah Hindia. Di mata orang Belanda, pergi ke “timur” atau Hindia merupakan jalan keluar terakhir bagi kaum menaengah Belanda untuk mendapat mata pencaharian (Vlekke, 2008). Dikarenakan dorongan pengaduan nasib, kaum menengah Belanda yang pergi ke Hindia dapat membandingkan bagaimana kehidupan penduduk setempat di negara Hindia. Sebuah tuturan kisah novel *Sang Juragan Teh* yang ditulis berdasarkan arsip-arsip keluarga ketiga *preanger planters* tersebut mengemukakan.

“Tinggal amat dekat dengan *kampong* [kampung], membuatnya [Rudolf Eduard Kerkhoven] kian menyadari kemiskinan penduduk setempat. Gubuk-gubuk mereka rusak, pakaian mereka usang dan compang-camping. Kegagalan panen padi, yang mengakibatkan kelaparan di banyak daerah di Jawa, juga dirasakan di Gambung, [wilayah di Bandung Selatan].” (Haase, 2015, hlm 166)

Pengalaman tersebut disaksikan oleh Rudolf Eduard Kerkhoven mengenai penduduk di perkebunan Gambung, Kabupaten Bandung. Karel F. Holle, pemilik perkebunan Waspada, Garut dan juga representasi orang Eropa yang “dekat” dengan penduduk lokal, juga mempunyai pendekatan yang sama dalam “memperhatikan” penduduk di Priangan. Karel F. Holle berasumsi, untuk dapat “memerintah” penduduk Priangan, seorang Eropa atau Belanda harus bertindak-tutur, mengerti adat-istiadat orang Priangan. Dengan demikian, orang Priangan dapat menganggap para *planters* itu sebagai atasan, dan menurutnya (Lubis, 1998). Berdasarkan hal tersebut, kepentingan orang Eropa sebagai pengusaha perkebunan dapat berusaha “mengambil” hati penduduk setempat sehingga merasa “aman” ketika mengelola perkebunan mereka.

Perkembangan sistem ekonomi Hindia Belanda awal abad ke-20 juga bersamaan dengan perkembangan

modernitas. Pengusaha perkebunan tidak hanya berfokus pada menaikkan keuntungan, melainkan stabilitas pasar serta lebih lanjut pada kehidupan mereka di Hindia Belanda sebagai penduduk tetap (Fakih, 2023). Sebagai orang kaya baru, mereka juga terlibat dalam sejumlah perbaikan-perbaikan kehidupan kolonial yang menunjang kestabilan hidup mereka. Di Priangan, pengusaha perkebunan berperan dalam proses pembangunan kehidupan kolonial tersebut. Haryoto Kunto menuturkan bahwa tidak semua para pengusaha perkebunan Eropa bersifat pelit dan menghamburkan uang (Kunto, 1986). Usaha keras dari hasil adu nasib yang dilakukan oleh *planters* ini berujung pada penghidupan yang layak di tempat mereka berinvestasi. Dengan memberikan kontribusi secara peran dengan kedekatan pada penduduk dan pemerintah, serta membangun secara fisik sebuah kota para *planters* berusaha membangun kehidupan mereka di Hindia Belanda. Di Priangan, kiprah dari ketiga keturunan dari Willem van der Hucht bersama-sama memiliki dan mengembangkan perkebunan juga berkontribusi pada pembangunan wilayah terutama di kota-kota utama seperti Bandung, Sukabumi, dan Garut.

Tulisan ini berusaha untuk melihat posisi mereka dalam situasi politik-sosial-ekonomi masyarakat Priangan, kemuculan budidaya teh di Priangan serta mengidentifikasi kiprah pengusaha perkebunan swasta di Priangan, khususnya ketiga keturunan Willem van der Hucht. Kajian mengenai *preanger planters* ditulis oleh Her Suganda, namun dalam kajian tersebut belum membahas bagaimana situasi politik ekonomi dan sosial di Hindia Belanda mendukung adanya investasi asing, sehingga menjadikan mereka sebagai orang kaya. Her Suganda Haryoto Kunto dalam pada buku *Wajah Bandoeng Tempoe Doeloe* juga membicarakan mengenai *preanger planters* sebagai orang kaya dari perkebunan, tetapi tidak mengulas bagaimana kondisi politik-ekonomi kolonial mendukung kemunculan para *planters*. Tulisan Nina Herlina Lubis membahas mengenai hubungan kaum menak dengan pengusaha perkebunan, diantaranya Karel F. Holle, Namun, masih terfokus pada hubungan *planters* dengan menak yang memiliki hubungan mutualisme.

Kajian mengenai *preanger planters* menjadi penting dibahas untuk melihat bagaimana dinamika pengusaha swasta di Priangan. Hal itu juga didukung oleh wilayah Priangan merupakan salah satu pioner terbukanya perkebunan kolonial, yaitu dari perkebunan kopi di masa *preanger stelsel*, kemudian menjadi perkebunan-perkebunan dengan komoditas ekspor lainnya. Batasan aspek temporal pada tulisan ini juga yaitu terbatas

pada tahun 1862 sebagai tahun awal kontrak yang diberikan pemerintah kolonial berdurasi 20 tahun kepada Adriaan Holle sebagai pengusaha swasta di Priangan. Batas akhir pada tulisan ini yaitu 1942 sebagai akhir dari masa pemerintahan Hindia-Belanda, yang juga berakhirnya era perkebunan masa pemerintahan kolonial. Sumbangan-sumbangan *preanger planters* ini tidak terlepas dari konteks kehidupan di Priangan khususnya masa kolonial. Oleh karenanya, perlunya sumber-sumber pembanding atas kiprah yang dilakukan oleh mereka untuk melihat kesesuaian konteks dengan kolonialisasi yang terjadi di Priangan.

METODE

Dalam melakukan kajian pada tulisan ini, tentunya diperlukan metode penelitian yang sesuai yaitu metode sejarah. Adapun metode sejarah memiliki empat tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi (Herlina, 2008, hlm 15). Tahapan heuristik yaitu sebuah tahapan dalam menemukan sumber yang digunakan dalam penelitian. Adapun bentuk sumber tersebut ditemui pada dokumen, arsip, buku-buku, surat kabar, jurnal, dan sumber lain yang mendukung. Sumber yang menarik digunakan dalam kajian ini adalah novel sejarah Hella S. Haasse yang memiliki judul asli "The Tea Lords", yang dipublikasikan di Belanda pada 1992, kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul "Sang Juragan Teh". Arsip keluarga mengenai Van Der Hucht saat ini berada di arsip Nasional Belanda yang sulit didapatkan oleh penulis. Meskipun demikian, Novel "Sang Juragan Teh" tidak hanya satu-satunya sumber utama dalam penulisan ini. Sumber lain yang sezaman diantaranya adalah koran, majalah pertanian dari *Departemen van Landbouw*, majalah *Mooi Bandoeng*, dan foto-foto yang menjadi bukti sejarah untuk digunakan dalam penelitian ini. Tahap kedua dari metode sejarah adalah kritik atau verifikasi. Kritik adalah bagian upaya memverifikasi keabsahan sumber-sumber yang digunakan. Kritik penggunaan sumber novel sejarah Hella S. Haase adalah dengan membandingkan dengan koran-koran yang diperoleh dari sumber digital seperti *delpher*, foto maupun majalah digital yang diambil dari koleksi dari Universitas Leiden. Kemudian, tahap ketiga disebut dengan interpretasi. Interpretasi dalam penelitian ini yaitu memberikan pemahaman baru mengenai kehidupan *preanger planters* yang mengadu nasib ke tanah koloni. Dengan sistem kebijakan politik-ekonomi kolonial yang berubah menjadi kepemilikan modal, para *planters* ini muncul sebagai golongan kaya, serta memiliki eksistensi di negara Hindia Belanda. Kekuasaan Belanda sejak masa VOC di

Priangan berupaya mengambil alih tenaga kerja. Hal tersebut didukung dengan hubungan patron-client yang ada dalam relasi petinggi dan bawahan. Dalam kajian ini, yaitu Bupati sebagai petinggi sekaligus bangsawan, serta memiliki bawahan-bawahan yang juga menguasai tenaga kerja di sampai tingkat bawahnya, yaitu rakyat pribumi. Dalam Breman (2014) bahwa Ben Anderson mengemukakan konfigurasi kekuasaan tersebut bahwa sebagaimana kekuasaan seseorang diukur dari besarnya jumlah penduduk yang dikuasainya, demikian pula kekuasaan pejabat bawahan diukur dari besar jumlah rakyat yang dipimpinnya. Dalam hal ini, struktur administratif dalam relasi atasan bawahan bersifat hierarkis dan memiliki lapisan-lapisan hubungan patron klien. Bawahan tidak memiliki status otonomi apapun kecuali hubungan dengan atasannya.

Dalam konteks ini, Pengusaha perkebunan memanfaatkan hubungan yang telah terjalin secara sosial-politik diantara para pejabat kolonial dan menak, dan rakyat pribumi. Peran dan pengaruh dari *preanger planters* ini juga memperkuat bagaimana sebuah kebijakan dilaksanakan. Sebagaimana Karel F. Holle bekerja di bawah pemerintahan kolonial, pekerjaannya sebagai pegawai pemerintah urusan pribumi memberikan kesempatan baginya untuk mempelajari lebih dalam bagaimana kehidupan penduduk lokal. Sebagaimana nantinya, Karel F. Holle dapat memiliki hubungan dengan penduduk setempat, serta menjadi "tetua" bagi pengusaha perkebunan di Priangan. Bagian terakhir dalam penulisan ini adalah tahap historiografi, yaitu sebuah tahap penulisan atau rekonstruksi masa lalu yang merupakan hasil dari penafsiran atas fakta-fakta menjadi sebuah kisah sejarah. Penelitian ini merupakan historiografi yang berupaya menunjukkan kiprah-kiprah *preanger planters* dan dinamikanya dalam perkembangan negara kolonial, khususnya di Priangan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dari *Preanger Stelsel* hingga *Heeren van de Thee*: Situasi Politik Ekonomi Sosial di Priangan

Wilayah Priangan membentang dari ujung Barat Pulau Jawa berbatasan dengan wilayah Banten, ujung timur dibatasi oleh Karesidenan Banyumas, dan sebelah utara berbatasan dengan Batavia dan Karesidenan Cirebon. Dengan wilayah berbukit dan pegunungan, serta dialiri oleh dua yaitu Sungai Cimanuk dan Citarum, Wilayah Priangan didiami oleh orang-orang Sunda yang tinggal di gunung maupun pesisir (Lubis, 1998, hlm. 29-30). Golongan sosial di masyarakat Priangan diidentifikasi menjadi beberapa golongan

yaitu menak, santana, dan somah. Golongan tertinggi disebut dengan menak yang merupakan Bupati dan pejabat lokal, sementara santana dan somah adalah golongan penduduk bumiputera. Bupati atau menak memiliki kekayaan yang berasal dari hasil tanah, pajak, dan tenaga kerja wajib. Selain itu, Bupati juga berkuasa atas wilayahnya sendiri, serta bergaya khas seorang raja (Lubis, 1998).

Kekuasaan Bupati mendominasi terutama dalam mengontrol wilayah dan penduduknya. Bentuk otoritas Bupati terhadap penduduknya dikenal dengan "ngawula". Otoritas tersebut merupakan sistem relasi atasan-bawahan antara penduduk dengan pejabat pemegang kekuasaan. Dalam laporan Van Rees, penduduk Priangan diwajibkan menyetor pajak pada petinggi bupati dan penguasa kolonial dalam bentuk tenaga kerja, uang, maupun hasil alam. Dengan menggunakan sistem tersebut, pemerintah kolonial sejak masa VOC memanfaatkannya untuk kepentingan eksploitasi mereka (Breman, 2014). VOC sebagai penguasa mengambil hak kepemilikan tanah dan hasil tanah yang digarap oleh penduduk melalui bupati sebagai perantara (Hoadley 1994 dalam Breman, 2014).

VOC dan pemerintah kolonial melakukan kebijakan sistem penanaman wajib bernama *preanger stelsel*. Penanaman kopi ini berada di bawah pengawasan bupati dan pemerintah kolonial. Pemberlakuan *preanger stelsel* dimulai sejak abad ke-18 hingga menuju akhir abad ke-19 (Muhsin, 2017). Dengan sistem tersebut, petani penanaman kopi harus membuka perkebunan di dataran tinggi Priangan, serta mencukupi kebutuhan hidupnya dengan bertahan hidup dengan di hutan memakan umbi, akar, maupun tanaman liar (Breman, 2014). Adanya sistem monopoli pemerintah kolonial terhadap perkebunan ini menjadi awal mula dari eksploitasi tenaga kerja maupun hasil tanah yang ada di Priangan. Kebijakan tersebut juga berlangsung hingga berakhirnya sistem tanam paksa yang digantikan oleh pemilik modal sebagai investor pada 1870.

Pada *preanger stelsel*, penduduk wajib menanam kopi untuk disetorkan kepada bupati dan pemerintah kolonial. Kemudian, kebijakan penanaman meningkat secara intensif pada masa *cultuurstelsel* yaitu sistem tanam paksa atau sistem budidaya yang dilaksanakan pada 1830. Pemerintah kolonial monopolistik pemerintah terlihat dalam rancangan pada kebijakan sistem tersebut, dan di sisi lain, membangun jaringan ekspor dengan negeri Belanda. Dalam sistem tersebut terdapat peran pengusaha swasta, namun, pengusaha swasta ini terlibat dalam lingkup yang terbatas. Pada 1854, kebijakan *Regeringreglement* mengubah peran

monopoli pemerintah kolonial. Pengusaha swasta diberi akses untuk dapat menyewa lahan pada tanah yang tidak ditanami, dan yang tidak berpenghuni, serta melakukan perjanjian kolektif dengan kepala desa. Perjanjian ini memungkinkan pengusaha swasta untuk dapat menanam lahan sawah dan kepala desa menyediakan tenaga kerja. Skema keterlibatan pengusaha swasta ini dengan masif muncul setelah aturan 1854 dikeluarkan (Fasseur, 1991).

Meskipun sistem budidaya pada mulanya merupakan monopoli pemerintah kolonial, lambat-laun pemerintah kolonial juga membutuhkan peran pengusaha swasta terutama dalam memberi modal dalam pengembangan tanaman-tanaman prioritas ekspor. Di dalam sistem budidaya, tanaman wajib ekspor diantaranya adalah kopi, gula, teh, dan nila. Di perbukitan Priangan, penanaman teh menjadi salah satu jenis percobaan yang menguntungkan terutama di awal abad ke-20. Penanaman teh digagas oleh *Heeren Zeventien* pada abad ke-18 di Priangan, namun tidak ada hasil dari percobaan tersebut. Pada awal abad ke-19, Du Bus de Gisignies membentuk Komite Utama urusan Pertanian untuk memperkenalkan budidaya tanaman baru. Perkembangan penanaman teh mulai kembali dilakukan pada 1826 oleh Dr. Ph. F. Von Siebold dari Desima-Jepang yang membawa bibit teh untuk ditanam di Jawa. Penanaman ini dilakukan di Kebun Raya Bogor. Hasil dari penanaman oleh Siebold tidak berpengaruh signifikan karena tidak ada pekerja ahli yang membudidayakan tanaman tersebut. Kemudian, pada 1827, Pada 1827, seorang ahli pencicip teh yaitu J.I.L.L Jacobson dikirim oleh *Nederlandsche Handel Maatshcappij* untuk pergi ke Canton, Tiongkok pada waktu-waktu tertentu selama satu tahun sekaligus mengidentifikasi teh-teh yang ditawarkan disana. Atas arahan Du Bus Gisignies, Jacobson melakukan perjalanan tersebut dan mengawali budidaya teh secara masif di Jawa (*Departement van Landbouw in Nederlandsch Indie*, 1910).

Percobaan penanaman teh di awal tahun 1830 – 1850an tidak memberikan keuntungan yang sepadan, hal tersebut menjadi kerugian bagi pemerintah kolonial yang masih memiliki monopoli terhadap komoditas perkebunan. Penyebab kerugian tersebut diantaranya adalah orang-orang Tiongkok di Jawa tidak mengetahui cara pengolahan teh. Mulanya, mereka dipekerjakan karena dinilai mampu mengolah dan pemerintah kolonial menganggap adanya kesamaan pengetahuan pengolahan budidaya teh dengan asal tempat mereka (Bernard, 1978). Permasalahan lain yaitu kurangnya teknologi pabrik dalam pengolahan teh menjadi sumber

kerugian bagi pemerintah kolonial. Daun-daun teh dari perkebunan diangkut dari pabrik sementara di perkebunan menuju pabrik utama di wilayah Jatinegara. Kondisi tersebut membuat daun-daun teh tidak lagi memiliki rasa orisinalitas yang sebanding dengan daun – daun segar. Oleh karenanya, kualitas dari daun tersebut menurun (Bernard, 1978).

Meskipun sistem penanaman monopoli tersebut mendapat kritik oleh golongan liberal di parlemen Belanda, pemerintah kolonial tetap memiliki kontrol penuh hingga tahun 1840-an. Memasuki 1850-an, sistem tanam paksa mendapati defisiensi serta hantaman bencana kelaparan yang terjadi di Demak, Cirebon, dan Grobogan (Vlekke, 2008). Kemudian, pada 1860, terdapat dua peristiwa penting yang mengkritik pemerintah kolonial. Pertama, yaitu terbitnya buku Max Havelaar, yang ditulis oleh Multatuli. Kedua, sebuah pamflet mengenai “Kontrak Gula” atau “Suiker Contracten”. Kedua peristiwa tersebut mengubah kaum liberal tidak hanya sebuah gerakan, tetapi juga menjadi sebuah kekuasaan (Furnivall, 2010). Multatuli secara langsung menyerang kebijakan tanam paksa dengan mencontohkan wilayah Karesidenan Banten. Di Banten, pemungutan pajak harus dibayarkan kepada pemerintah yang sewenang-wenang. Selain itu, penduduk Banten juga tetap harus melayani para petinggi pemerintahan lokal, seperti bupati dan wedana lainnya yang bekerja sama dengan pemerintahan hindia Belanda (Multatuli dalam Fasseur, 1991).

Tuntutan yang timbul setelah 1860-an memuncak dengan dorongan pembukaan lahan sewa di Hindia. Perubahan kebijakan politik ekonomi kolonial Hindia Belanda tersebut tidak terlepas dari benturan gagasan antara konservatif dan liberal di Parlemen Belanda. Orang liberal menginginkan kebebasan individu serta mendorong kesejahteraan sosial di Hindia Belanda (Furnivall, 2010). Kemudian, kebijakan pemerintah terhadap peraturan penyewaan lahan yang diberlakukan pada 1862 dapat menguntungkan mereka. Menuju awal abad ke-20, terdapat ledakan “semangat” besar dari Orang Belanda untuk mencari pekerjaan di dunia timur atau “Hindia”. Orang Belanda yang pergi ke Hindia dianggap sebagai orang yang “gagal” memanfaatkan kesempatan hidup di Belanda. Potensi wilayah Hindia - Belanda diharapkan dapat memberikan kesempatan untuk memperoleh kehidupan baik bagi orang yang bekerja keras (Vlekke, 2008).

Pengusaha swasta di Priangan tercatat telah ada bahkan sebelum UU Agraria 1870 diberlakukan. Satu keluarga planters yang dikenal di wilayah Priangan adalah keturunan Van der Hucht. Mereka mengadu

nasib ke Hindia-Belanda menggunakan kapal Sara Johana beserta dua keluarga besar. Pelayarannya melalui Tanjung Harapan, Afrika dan berlayar selama 151 hari, hingga tiba di Batavia pada 23 Februari 1844. Keluarganya mendapat kemalangan karena tidak dapat beradaptasi dengan udara tropis Batavia. Meskipun awal perjalanannya penuh kemalangan, berkat koneksinya dengan importir John Pryce, Willem van der Hucht tumbuh menjadi pengusaha Eropa di Hindia-Belanda (Suganda, 2014). Dengan semangat mengadu nasib dan keuntungan dalam jaringan bisnis di koloni, mereka memiliki posisi strategis terhadap pemerintah kolonial. Mereka memanfaatkan perubahan kebijakan politik ekonomi Hindia Belanda untuk dapat diberikan kewenangan dalam hak sewa tanah. Salah satu investor swasta yang tercatat menyewa tanah setelah peraturan *Regeringsreglement* 1854 diberlakukan adalah Adriaan Walraven Holle di Parakan Salak, dan Albert Holle di Sinagar dan Cirohani pada 1862 (Bernard, 1978). Dengan peraturan tersebut, mereka melakukan percobaan-percobaan tanaman ekspor untuk dapat terlibat dalam sektor perdagangan internasional. Para pengusaha swasta ini mengeluarkan modal untuk mengembangkan secara ilmiah dan terkoordinasi dalam sebuah organisasi pekebun yang dinamakan *Soekaboemische Landbouw Vereeniging*, dengan tujuan memajukan budidaya perkebunan. Di dalam asosiasi tersebut terdapat pertukaran pikiran dari para ilmuwan yang tergabung serta didukung oleh pengusaha swasta. Oleh karenanya, perkembangan budidaya tanaman lebih masif dibandingkan pada sistem budidaya. Kemajuan pengetahuan serta dukungan terhadap teknologi tersebut membawa para planters Priangan mampu meningkatkan hasil keuntungan mereka (*Departemen van Landbouw in Nederland Indie*, 1910). Dengan adanya perubahan cara produksi tersebut, para orang Eropa ini tidak lagi hanya mengadu nasib, melainkan mereka juga memiliki peran dalam memberikan kemajuan dalam sektor ekonomi negeri kolonialnya. Mereka juga menjadi penduduk tetap dengan tinggal di Priangan sebagai *planters*. Hal tersebut membawa mereka pada kesuksesan gaya hidup yang gemerlap, modern, serta menunjukkan dirinya sebagai “bangsawan” baru, secara tidak langsung, mempengaruhi masuknya budaya barat (Lubis, 1998).

Dengan keberhasilan dan keuntungan dari perkebunan yang mereka dapatkan, terjadi perubahan gaya hidup yang mempengaruhi perkembangan-perkembangan wilayah di sekitarnya. Kebiasaan para planters Eropa ini yaitu menghabiskan waktu akhir pekan dengan mengunjungi wilayah kota, yaitu kota Bandung. Mereka tinggal di pegunungan dan perkebunan selama hari Senin-Jum'at,

lalu pada hari Sabtu malam, mereka mendatangi pusat-pusat hiburan di kota dengan tujuan berekreasi. Rekreasi paling terkenal diantara mereka adalah pusat kota Bandung terutama di sepanjang jalan Braga, serta adanya gedung pertemuan *Societeit Concordia* (Hardjasaputra, 2002a). Hal serupa digambarkan oleh Haryoto Kunto, yaitu bahwa mereka para *planters* pergi ke kota bergaya khas Eropa, dan mendatangi toko-toko barang mewah Eropa yang juga memperlihatkan tolok ukur kekayaan mereka (Kunto, 1984).

Kemewahan gaya Eropa yang hidup pada awal abad ke-20 mendorong pertumbuhan kota-kota di Priangan. Wilayah lain yang menjadi daya tarik *planters* diantaranya adalah Kabupaten Sukabumi, Buitenzorg, dan Garoet. Akan tetapi, adanya kemewahan sebuah kota kolonial terlihat pada kabupaten Bandung, yang juga sebagai ibukota Karesidenan Priangan. Pembangunan Bandung mulanya terjadi pada 1810 oleh Daendels dan Bupati Wiranatakusumah II. Pada awalnya, pembangunan Bandung masih berpusat pada pola kota tradisional. Akan tetapi, semakin berkembang ketika peningkatan pembukaan lahan swasta dan sarana transportasi jalan kereta api yang menghubungkan antar kabupaten di Priangan (Sobana, 2003). Oleh karenanya, sebagai ibukota Karesidenan Priangan, pada awal abad ke-20, Bandung sebagai sebuah kota kolonial dipengaruhi oleh kepentingan pemerintah kolonial dalam membangun ruang kota yang baru, dan hunian “layak” bagi keberlangsungan hidup “keluarga modern” di negara kolonial (Fakih, 2023). Meskipun gaya hidup Eropa yang muncul dari orang kaya dari perkebunan, terdapat anomali beberapa pengusaha perkebunan yang tidak hanya mencerminkan kekayaan dan gaya hidup Eropa. Mereka memiliki kiprah dalam pembangunan Kota Bandung sebagai kota kolonial, sekaligus kemajuan negara kolonial. Preanger *planters* yang dapat diketahui secara garis genealogis di wilayah Priangan adalah keturunan dari Willem van der Hucht yaitu keluarga Holle, Kerkhoven, dan Bosscha (Suganda, 2014). Ketiga keluarga tersebut memiliki posisi strategis, dan berkontribusi dalam mengembangkan budidaya tanaman. Kemudian, keluarga tersebut tumbuh menjadi orang kaya baru dengan julukan “Raja Teh” di Priangan. Karel F. Holle, administrator perkebunan di wilayah Waspada, Garut. Keluarga Kerkhoven adalah pemilik pengusaha perkebunan di Sinagar, Parakan Salak wilayah Sukabumi, serta di wilayah Bandung yaitu di Arjasari dan Gambung. Karel Albert Rudolf Bosscha memiliki perkebunan di wilayah Malabar, Bandung (Julaeha, 2010). Ketiga keluarga pengusaha perkebunan dikenal karena sumbangannya terhadap kemakmuran dan

kesejahteraan dalam memperhatikan kondisi Hindia-Belanda (Ratnawati, 1990). Selain itu, menurut Haryoto Kunto (1984), I.R Kerkhoven dan K.A.R Bosscha diangkat sebagai warga teladan kota Bandung atas sikap filantropi dalam membangun sarana pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan sumbangan-sumbangan sosialnya di Kota Bandung.

2. Kiprah Keluarga Raja Teh Priangan

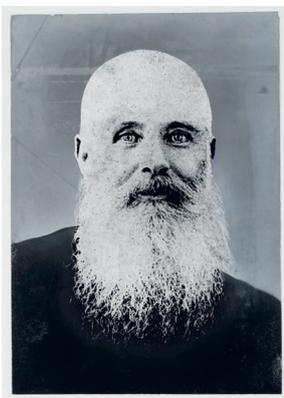
2.1 Karel Frederik Holle

Karel Frederik Holle anak dari Pieter Holle, saudara Willem van der Hucht dari yang ikut pada perjalanan pengaduan nasib yang dilakukannya pada 1843. Mulanya, keluarga Holle bekerja dan tinggal di perkebunan Bolang daerah Jasinga, Buitenzorg. Namun, karena kondisi medis, keluarga Holle pindah ke Parakan Salak milik Willem van der Hucht. Pada 1846, orang tua Karel F. Holle meninggal. Berkat relasi Willem van der Hucht dengan Gubernur Jenderal J.J Rouschen, Karel F. Holle mendapat pendidikan privat dengan anak Gubernur Jenderal di Istana Buitenzorg (Suganda, 2014). Kemudian, pada 1846, Karel F. Holle bekerja di kantor asisten residen Cianjur dan berpindah ke *Departement van Cultures* kemudian ke *Middelen en Domeinen* pada 1847. Setelah sepuluh tahun bekerja di bidang pemerintahan, pada 1857 Karel F. Holle beralih pekerjaan sebagai administratur perkebunan di Cikajang, Garut (Janssen, 1888). Berdasarkan biografi Karel F. Holle yang ditulis oleh C.W Janssen pada 1888, Karel F. Holle memanfaatkan pengalamannya bekerja di pemerintahan untuk mengamati penduduk setempat. Ia melakukan perjalanan dinas ke seluruh Jawa dan Madura selama 10 bulan. Hasil dari perjalanannya yaitu sebuah pengamatan bahasa dan budaya, serta perbandingan antara orang Sunda dan orang Jawa. Orang Sunda kurang teroganisir dan tidak peka terhadap kemajuan. Selain itu, Holle mengamati pengaruh kepala penghulu (imam), kepala desa, dan pemerintahan lokal di masyarakat setempat. Karel F. Holle menerjemahkan prasasti dan manuskrip dan membandingkan kemampuan orang Sunda di masa sebelum adanya kerajaan Islam. Ketika ada penguasaan Islam (Mataram-Cirebon), monopoli VOC, dan masuknya pengusaha-pengusaha swasta Eropa, infiltrasi tersebut meredupkan eksistensi jati diri orang Sunda (Janssen, 1888).

Karel F. Holle memberi “nasihat” pada pemerintah kolonial untuk melakukan reorganisasi Priangan pada 1870. Reorganisasi tersebut didorong dari aspirasi bupati dan pejabat lokal dengan berupaya untuk meninggikan harga kopi. Holle pergi ke Batavia dan menyampaikan pada Gubernur Jenderal apabila reorganisasi ini tidak diselenggarakan, maka bisa saja ada perlawanan dan

pemberhentian kerja dari penduduk. Kemudian, pada Maret 1871, melalui telegram dari Menteri Koloni P.P Van Bossed menyetujui reorganisasi priangan (Berge, 1989, hlm 40-45). Karel F. Holle menjadi ahli dalam “mengatasi” permasalahan di wilayah Priangan atau Sunda. J. Noordyun menuturkan bahwa Karel F. Holle adalah seorang “amateur” serta memiliki pengetahuan praktis mengenai masyarakat, bahasa, dan budaya Sunda. Selain itu, juga memiliki kedekatan dengan masyarakat setempat, dan memiliki perhatian terhadap kesejahteraan dan kebudayaan masyarakat Sunda. Karel F. Holle aktif menulis dan menerbitkan majalah sederhana mengenai pertanian, majalah tersebut terkenal sebagai *Mitra Noe Tani* yang terbit pada 1874 (Noordyun, 1988).

Kiprah Karel F. Holle lainnya dalam bidang pendidikan, budaya, dan bahasa sunda yaitu dengan membuat sekolah Guru di Kota Bandung. Sekolah Guru ini menunjukkan adanya upaya menghadirkan budaya Sunda sebagai identitas penduduk Priangan. Di wilayah Priangan, Menurut Holle budaya Sunda tidak dikenal sebagai identitas mereka dikarenakan penetrasi budaya Jawa dan Madura. Oleh karena itu, adanya *kweekschool* ini mendapat dukungan dari Gubernur Jenderal Loudon, Residen Priangan C. Van der Moore, Bupati Bandung dan jajarannya (Verslag, 1867). Selain itu, Karel F. Holle juga menulis dan menyeleksi buku-buku pembelajaran siswa di sekolah-sekolah di Priangan. Holle dibantu oleh Raden Moh Moesa menyusun bahan-bahan ajar bacaan sunda. Holle menulis cerita fabel berjudul *monyet jeung kuya* berbahasa sunda. Selain itu, dia juga membuat huruf-huruf sunda kuno serta memproduksi buku-buku berbahasa sunda, yang diproduksi dari orang Sunda langsung yang tinggal di rumah Holle di Garut. Penulis-penulis tersebut diantaranya adalah Mohammad Moesa, Adi Widjaja, dan Bratawidjaja (Moriyama, 2005)



Gambar 1. Karel F. Holle

sumber: <http://hdl.handle.net/1887.1/item:786030>

Meskipun sempat mendapat tentangan dikarenakan perilaku Karel F. Holle yang “terlalu” dekat dengan bumiputera, Holle mendapat dukungan pemerintah dalam menerbitkan buku-buku tersebut (Moriyama, 2005: 97). Kecurigaan tertentu muncul atas sikap dari Karel F. Holle. Hubungannya dengan pejabat maupun sebagai pemerhati penduduk mendapat sindiran. Hal tersebut tertulis pada surat-surat berbahasa Sunda pada 1861. ..“Basa Sunda itu bukan bahasa”. Sindiran tersebut datang dari golongan bangsawan Sunda atau ménak, secara tidak langsung golongan itu juga merendahkan bahasa sunda (Lubis, 2000). Selain itu, Pada 1872 seorang penulis anonim menuliskan cerita bersambung dalam harian *Java Bode* berjudul “Kenangan Kehidupan Seorang Ambtenaar”. Dalam cerita ini disindir mengenai kehidupan Karel F. Holle, yakni dukungannya terhadap agama Islam sehingga dicurigai bersekongkol untuk membuat pemberontakan (Lubis, 1998, hlm.118). Hal ini juga diulas oleh Hella S. Haase dalam Sang Juragan Teh sebagai kutipan berikut.

“ada banyak usaha mendiskreditkanku. Apa kau [Adriaan dan Rudolf E Kerkhoven] bisa membayangkan betapa memalukannya bahwa kawan-kawanku –Patih Mangunreja, Patih Galuh, dan Raden H Mohamad Moesa- harus diinterogasi atas aktivitasku. Belum lagi tuduhan dalam harian *Java Bode*. Tuduhan yang paling aktual bahwa aku mendukung Islam untuk memberontak kepada pemerintah. Bayangkan, sekolah-sekolahku, toko-toko bahan pangan, bengkel kerja kerajinan rakyat dianggap sebagai sarang-sarang pemberontakan. Apakah mereka lupa, tidakkah mereka lihat bahwa semua tergantung pada sikap kita sendiri” ujar Karel F Holle (Haase, 2015: 108)

Karel F. Holle meneliti *tatarucingan* orang sunda. Menurutnya, *tatarucingan* disukai oleh masyarakat baik yang muda maupun tua (Holle, 1867). Selain itu, Karel F. Holle menuliskan buku-buku berbahasa Jawa dan Sunda diantaranya menulis *Grafik Oud en Nieuw Indische Alphabetten* yang diterbitkan oleh *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*, lalu *Hamong Tani: De Vriend van de Javaanchen Landman* (*Mitra Noe Tani*) diterbitkan tahun 1876 oleh *Batavia Landsrukkerij* dalam bahasa Jawa, berisi tentang cara bertanam padi. Karel F. Holle menuliskan sejarah Priangan yang bersumber dari Pangeran Cirebon dan Bupati Sumedang dan ia menerjemahkan prasasti batu tulis bogor pada 1867 bersama Friedrich. Namun, Holle berpendapat penulisan sejarah Priangan itu memerlukan konfirmasi yang jelas dari berbagai pihak (Holle, 1867).

2.2 Keluarga Kerkhoven

Kerkhoven merupakan marga *planters* lain yang juga merupakan sepupu dari Holle. Keluarga ini memiliki perkebunan di wilayah Sukabumi dan Bandung. Pada 1855, Eduard J. Kerkhoven mengurus Perkebunan Sinagar, di Sukabumi setelah diwarisi dari Willem van der Hucht. Eduard J. Kerkhoven memiliki hobi berburu. Lantai di rumahnya dilapisi kulit harimau, ruang tamunya terdapat kulit ular piton sepanjang tujuh meter. Di perkebunannya, dia juga memiliki binatang peliharaan seperti banteng, gajah, mencek, peucang (kancil), burung merak, dan berbagai jenis burung lain. Adriaan W. Kerkhoven anak dari Eduard merupakan seorang keturunan dari hasil perkawinannya bersama Goey La Nio, perempuan Tionghoa. Adriaan W. Kerkhoven disekolahkan ke Belanda dan diakui sebagai keluarga Kerkhoven (Suganda, 2014).

Dalam penuturan Hella S. Haase, Rudolf A. Kerkhoven membuka perkebunan Arjasari di Bandung, kemudian mewarisi kepada anaknya yaitu Rudolf Eduard Kerkhoven. Mulanya, Rudolf E. Kerkhoven belajar membudidayakan teh dari pamannya, Eduard J. Kerkhoven di Parakan Salak, Sinagar, dan Munjul. Rudolf E. Kerkhoven membangun perkebunan Gambung di Bandung wilayah selatan. Kehidupan pernikahan Rudolf E. Kerkhoven dengan Jenny Roosgarde Bisschop - yang merupakan cicit dari Daendels, ayah mertuanya adalah wakil ketua Mahkamah Tinggi. - dianugerahi lima orang anak. Di bawah administrasi Rudolf E. Kerkhoven, perkebunan Gambung berkembang menghasilkan keuntungan.

Perkebunan Kerkhoven di Priangan diantaranya adalah Arjasari, Gambung, Talun, Negla, Sinagar, dan Parakan Salak. Keluarga Kerkhoven berperan dalam perkembangan teh serta mengagaskan kesadaran pentingnya pengetahuan budidaya teh. Gagasan tersebut diwujudkan Eduard J. Kerkhoven dan *planters* lainnya yang membentuk asosiasi untuk berkumpul, mengembangkan gagasan dan teknologi budidaya bernama *Soekaboemische Landbouw Vereeniging* (Perkumpulan Pekebun Sukabumi). Perkumpulan ini terdiri dari *planters* dan peneliti, diantaranya Eduard J. Kerkhoven dan Dr. J. Treub. Tujuannya adalah membicarakan terkait pemupukan dan pengolahan perkebunan, riset-riset tentang peningkatan kualitas produk. Akhirnya, pada 1893 beberapa perkebunan menetapkan akan menyediakan sejumlah uang untuk menggaji seorang asisten peneliti budidaya teh di Laboratorium Pertanian Kebun Raya Bogor. Ini adalah cikal bakal dari *Theeproefstation* (Balai Penelitian Teh) yang lahir pada tahun 1894. Pendanaan balai penelitian

ini dikelola oleh suatu panitia yang diamanahkan oleh SLV, dan diketuai oleh Eduard J. Kerkhoven. Balai penelitian telah disusun ulang pada 1916, kemudian memisahkan diri dari SLV, serta didirikan sebuah perkumpulan "Algemeen Proefstation voor Thee" sebagai pengurus mandiri yang diketuai oleh K.A.R Bosscha sejak 1917. Namun, kerja sama dengan SLV masih terus berjalan (Bernard, 1978).

Keluarga Kerkhoven di Sukabumi memiliki kegiatan berburu dan memelihara satwa liar menjadi bagian kegiatan mewah mereka. Berburu merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh bangsawan di Eropa, yang beralasan sebagai proteksi diri dan proteksi tanaman perkebunan. Sementara itu, Bupati dan bangsawan di Priangan memiliki cara berburu mereka sendiri. Dengan membawa rombongan, mereka kemudian menembaki satwa buruan dari sebuah panggung, yang sebelumnya satwa tersebut digiring ke dalam lapangan yang dikelilingi pagar. Cara berburu seperti yang dilakukan pejabat lokal tidak disukai oleh Eduard Julius Kerkhoven. Hal tersebut dianggap sebagai pembantaian yang diorganisasi. Sehingga, Eduard Julius Kerkhoven menyewa sebidang tanah di pantai selatan, sebuah alam liar dengan wilayah hutan dan gunung-gunung, kemudian menjadi kawasan konservasi bagi satwa-satwa liar. Hal tersebut diwujudkan dengan pembentukan venatoria pada 1898 oleh Rudolf Eduard Kerkhoven dan Adriaan Kerkhoven. Venatoria didirikan di Cikepuh yang dekat dengan wilayah perkebunan dan masih banyak satwa-satwa liar, seperti banteng dan rusa. Venatoria ini memiliki dasar-dasar konservasi satwa liar, yang mengubah hutan di Priangan selatan menjadi hutan lindung. Hal ini menjadi awal mula dari gagasan konservasi satwa liar khususnya di Priangan, serta menginisiasi konservasionis Hindia Belanda untuk mendirikan *Nederlandsch Indische Vereeniging tot Natuurbescherming* (Perkumpulan Pelestarian Alam Hindia Belanda) pada 22 Juli 1912, serta K.A.R Bosscha juga terlibat sebagai donatur dalam perkumpulan ini (Gustaman, 2019)

2.3 Karel Albert Rudolf Bosscha

Karel Albert Rudolf Bosscha (K.A.R Bosscha) lahir pada 15 Mei 1865 di 's Gravenhage. K.A.R Bosscha adalah anak dari Prof. Johannes Bosscha (1831) yang merupakan seorang Guru Besar Fisika di Akademi Militer Breda dan Direktur Sekolah Politeknik Delft (Suganda, 2014). Kedatangan pertama K.A.R Bosscha ke Hindia bertujuan untuk mengunjungi bisnis saudara laki-lakinya yaitu Dr. Jan Bosscha di Kalimantan (Suganda, 2014). Dalam penuturan Hella S. Haase pada buku Sang Juragan Teh (2015), pada 1887, K.A.R Bosscha tiba di Jawa dan mengunjungi pamannya yaitu Eduard J.

Kerkhoven di Sinagar, Sukabumi. Bersama pamannya, K.A.R Bosscha belajar mengenai budidaya teh, lalu pada 1889 membuka perkebunan teh di Kalimantan Barat. Akan tetapi, usahanya tersebut gagal dikarenakan keadaan transportasi dan tenaga kerja di Kalimantan belum memadai. Pada 1892, K.A.R Bosscha kembali ke Jawa, di waktu yang bersamaan, sepupunya, Rudolf E. Kerkhoven memperluas usaha budidayanya dari Gambung ke wilayah Malabar, Bandung wilayah selatan. Bertepatan dengan itu, atas saran dari Karel F. Holle, K.A.R Bosscha dipromosikan oleh Eduard J. Kerkhoven untuk menjadi administrator di Malabar. Pada 1896, K.A.R Bosscha resmi menjadi administrator di Malabar.



Gambar 2. Rumah K.A.R Bosscha

sumber: <http://hdl.handle.net/1887.1/item:782036>



Gambar 3. *Technische Hoogere School*

Sumber: <http://hdl.handle.net/1887.1/item:846086>

Kiprah K.A.R Bosscha dalam perkembangan pendidikan di wilayah koloni Hindia Belanda. Relasi K.A.R Bosscha dengan ayahnya yang juga Guru Besar Fisika di Politeknik Delft, dan saudara laki-lakinya yaitu seorang geolog Prof. Jan Bosscha menunjukkan bahwa lingkungan Bosscha memiliki lingkungan akademisi (Suganda,

2014). Di Hindia-Belanda, K.A.R Bosscha mendukung pembangunan *technische hogere school* sekarang disebut Institut Teknologi Bandung. Berdasarkan *Staatsblad* No 218 Tahun 1921, di Hindia Belanda, sebuah sekolah teknik didirikan dan diawasi langsung oleh Politeknik Delft Belanda. Seorang guru besar ilmu pasti terapan dan mekanika Politeknik Delft bernama Prof. Ir. J. Klopper ditunjuk untuk menjadi penanggung jawab atas sekolah ini oleh komisaris pembangunan sekolah Dr. J. W. Ijzerman. Dalam pendanaan, pembangunan ini didukung oleh K.A.R Bosscha sekaligus menjadi ketua *College van Directeuren*, yaitu sebuah organisasi yang berfungsi untuk mendampingi kebutuhan material akan pembangunan TH di Hindia-Belanda (Sakri, 1979). Sebagai ketua dalam Asosiasi Pembangunan Bandung, dengan posisi K.A.R Bosscha tersebut dia dapat mendorong pembangunan kota untuk keuntungan industri (Fakih, 2023). Sekolah tinggi di bidang teknik diharapkan dapat mengembangkan dan melahirkan insinyur-insinyur yang dapat mengelola mesin-mesin produksi bagi perkembangan industri di Hindia Belanda.



Gambar 4. Observatorium Bosscha

Sumber: <http://hdl.handle.net/1887.1/item:840187>

Pada bidang astronomi, K.A.R Bosscha membangun observatorium. Seorang astronom, Joan George Erardus Gijabert Voute di Hindia Belanda berelasi dengan K.A.R Bosscha dan Rudolph A. Kerkhoven serta didukung oleh pemerintah Hindia Belanda dalam mengembangkan pembangunan tersebut (Rifanti, 2013). Sebuah laporan tahunan Perkumpulan Perbintangan Hindia-Belanda tahun 1921 menyatakan bahwa K.A.R Bosscha mendatangkan sebuah refraktor ganda dari Jerman. K.A.R Bosscha mendapatkan reaktor tersebut setelah mengunjungi pabrik Carl Zeiss di Jena dan Carl Bamberg di Berlin. Zeiss menyarankan untuk mengambil kedua

teropong besar. Sementara itu, Rudolph A. Kerkhoven disarankan Bamberg untuk menyumbangkan akomodasi pembelian kedua teropong tersebut. Selain oleh Bosscha dan Kerkhoven, pembangunan observatorium ini didukung oleh perusahaan-perusahaan seperti *Javasche Bank* dan *De Bataafsche Petroleum Maatschappij* serta kedua perusahaan tersebut turut menyumbangkan sebesar f 10.000 (Jaarverslag NISV, 1920-1921).

Kemajuan dalam pembangunan sekolah tinggi, perkembangan ilmu pengetahuan, serta kemajuan-kemajuan lainnya di wilayah kolonial Hindia Belanda merupakan bagian dari percobaan pembentukan Bandung sebagai kota kolonial modern. Bentuk modernitas lain yang turut dibangun oleh K.A.R Bosscha diantaranya adalah dukungannya terhadap pembangunan *Preanger Telefoon Maatschappij*. K.A.R Bosscha berperan sebagai pengawas, inisiator, serta penasihat teknis dalam perusahaan tersebut (Uker, 1935). Kemudian, pada Rapat 16 Juli 1897, K.A.R Bosscha memegang peranan sebagai komisaris (De Preanger Bode, 1897). Untuk mengembangkan budidaya teh, K.A.R Bosscha tercatat sebagai donatur dalam Biro Pakar Asosiasi yang juga menunjuk kota Bandung sebagai kantor pusat penelitian teh bersama dengan Mr. S.W Zeverijn, President: Geo. Wehry & Co. Sekretaris dan Aset Messrs. E. H. Evans, Odo van Vlotten (Uker, 1935). Selain pada bidang pendidikan maupun bentuk-bentuk modernitas di kota Bandung sebagai kota kolonial Hindia Belanda, kiprah K.A.R Bosscha juga terdapat pada bidang sosial. Dananya mengalir ke beberapa lembaga sosial di Kota Bandung, yaitu Lembaga Buta, Lembaga Bisu-Tuli, Lembaga Kanker, dan Rumah Sakit Bandung.

Di akhir abad ke-19, diperkirakan terdapat 30.000 kasus kebutaan di Jawa. Kasus tersebut mendorong Residen Bandung mengadakan pertemuan pada 16 April 1901, yang bertujuan untuk membentuk cabang lembaga dari Belanda yaitu *Vereniging tot Verbetering van het Lot der Blinden in Nederland en zijne Kolonien* mengenai tuna netra. Tokoh-tokoh yang menghadiri pertemuan tersebut adalah anggota komisi persiapan, E.H Carpentier Alting, J. Bouwens, W.L.C den Hamer, Heskes, A.E Kerkhoven, dan Raden Adipati Soeria Atmadja. Berdasarkan surat keputusan pemerintah nomor 9 tanggal 6 Agustus 1901, didirikan sebuah lembaga *Vereeniging tot Verbetering van het Lot der Blinden in Nederlandsch Oost Indie*. Sebuah rumah perawatan untuk disabilitas tuna netra yaitu *Blinden Instituut* di Bandung berdiri di Tjijendoweg (Jln. Cicendo, saat ini bernama Wyata Guna). Pada awal berdiri, *blinden instituut* memiliki dua siswa Eropa dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Namun, seiring bertambahnya jumlah siswa, sarana di Tjijendoweg tidak mencukupi untuk menampung siswa. Oleh karena itu, K.A.R Bosscha menyumbangkan tanah miliknya yang berada di jalan *Nieuw Kerkhofweg* dan menyumbangkan gedungnya. Pembukaan gedung baru *Blinden Instituut* yang bertempat di *Nieuw Kerkhofweg* dilaksanakan pada 14 Juli 1903. (Rachman, 2011).

Bentuk bantuan lainnya K.A.R Bosscha yaitu kepada lembaga penyandang tunarungu. Lembaga tersebut yaitu *doofstommen instituut*. Mulanya, lembaga ini berasal dari sebuah sekolah tuna rungu yang digagas oleh Ny. C.M Roelfsma, istri seorang dokter ahli THT yang juga menampung anak tuli dan berasal dari pasien suaminya di Jalan Riau No. 20, Bandung (*Mooi Bandoeng*, 12 Juni 1934 jr 1). Berdasarkan harian *De Indische Courant* tertanggal 6 Agustus 1931 atas usaha Nyonya Roelfsma dan Tuan Bloemink, serta mempertimbangkan kebijakan Dewan Kota Bandung, Warisan K.A.R. Bosscha yang dikelola oleh Rudolph A. Kerkhoven, menyumbangkan uang sebesar f 50.000 untuk *Doofstommen instituut*. Setelah tahun ke-lima Bosscha meninggal, yaitu tepatnya tanggal 6 Mei 1933 sebuah gedung sekolah baru dan asrama didirikan di atas sebidang tanah donasi K.A.R Bosscha di jalan Cicendo (*De Indische Courant*, 1931).

Kiprah sumbangan K.A.R Bosscha dalam bidang kesehatan lainnya yaitu sumbangan pada *kanker instituut* yang memiliki laboratorium utama di RS Juliana Bandung (RSHS Bandung). Lembaga kanker tersebut memperoleh sumbangan sebesar f. 25.000 (Preanger Bode, 1926). Selain itu, mendapat bantuan radium yang dipesan dari Eropa. Lalu, sumbangan lain dari K.A.R Bosscha adalah Radium yang dipesan langsung dari Eropa (*Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie*, 1925). Dalam pembangunan RS Juliana Bandung, K.A.R Bosscha memberikan area seluas 25.000 meter persegi. Dengan rencana pembangunan pada sisi sayap, dibangun laboratorium kimia dan serologi yang mana biaya pembangunannya lebih dari satu juta gulden ditanggung oleh K.A.R Bosscha (*Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch Indie*, 1928).

Dalam usaha pembangunan kota kolonial modern di Bandung, secara berkesinambungan K.A.R Bosscha juga memiliki kiprah dalam peningkatan ekonomi dan modernitas pada negara kolonial. Adanya media promosi sebagai ajang pertunjukkan kondisi kota kolonial, sebuah perayaan tahunan yaitu *Jaarbeurs* digelar untuk mempromosikan produk-produk dari negara koloni Hindia Belanda. Dalam perhelatan tahunan tersebut yang diakomodasi oleh perhimpunan *Vereeniging Nedelandsch Indisch Jaarbeurs*, K.A.R Bosscha bertindak sebagai anggota, ketua harian, sekaligus donatur dalam

perayaan tahunan tersebut (*Vereeniging "Nederlandsch-Indie" Jaarbeurs*, 1920). Berdasarkan surat kabar *The Locomotive*, sebuah kompetisi promosi iklan untuk penyelenggaraan pameran tahunan yang akan diselenggarakan pada 1920 (*Locomotive*, 29 Maret 1919). Berlangsungnya *Jaarbeurs* menandakan bahwa *Jaarbeurs* di Bandung merepresentasikan gaya pameran Eropa pertama, yang didalamnya terdapat importir, produsen, manufaktur lokal, dan retail yang memasarkan produk-produk mereka, serta diiringi dengan hiburan-hiburan lokal untuk menambah menarik minat pengunjung (van der Meer, 2017, hlm 510). Atas upaya-upayanya tersebut, K.A.R Bosscha diangkat sebagai warga kehormatan Kota Bandung karena berperan dalam menyumbangkan kekayaannya di berbagai bidang (*Rotterdamsche Nieuwsblad*, 1928).

Keterbukaan ekonomi di Hindia Belanda meningkatkan ekonomi pasar kolonial, sekaligus memunculkan golongan orang-orang kaya, yang lahir di negara kolonial. Orang-orang kaya tersebut memiliki akses untuk kehidupan bercorak "modern" khas kolonial terutama di kota-kota besar di Jawa, diantaranya adalah Bandung. Kota Bandung merupakan salah satu percobaan pemerintah kolonial untuk membentuk kota kolonial yang mirip dengan Eropa. Gagasan itu muncul karena adanya dorongan membentuk sebuah "keluarga" atau "kehidupan" Eropa di negara-negara koloni. Hal tersebut memunculkan ruang-ruang kolonial domestik sebagaimana bentuk peradaban orang Eropa (Fakih, 2023). Kehidupan sosial di Bandung menunjukkan bentuk "peradaban Eropa" sehingga Bandung dijuluki "parijs van java" yang diketahui dicetuskan pertama kali oleh Tuan Roth seorang pemilik toko Meubel di Jl. Braga pada saat mempromosikan barang dagangannya "Bandoeng Parijs van Java" di *Jaarbeurs*. Kemudian semboyan itu dipopulerkan oleh K.A.R Bosscha dalam pidatonya pada masyarakat Bandung (Kunto, 1984).

KESIMPULAN

Kedaaan Priangan yang berbukit dan dialiri dua sungai besar, serta pemerintahan lokal yang telah terbentuk relasi patron-client dimanfaatkan oleh penguasa mendukung terbentuknya sistem ekonomi perkebunan kopi. Kondisi penduduk Priangan memiliki ketaatan terhadap Bupati dan pejabat lokal, serta penguasa kolonial. Setelah 1870, Sistem politik ekonomi kolonial berubah haluan menjadi lebih liberal. Pengusaha swasta hadir sebagai "majikan" baru dari para penduduk Priangan. Akan tetapi, kehadiran pengusaha swasta tersebut tidak hanya berperan sebagai majikan, namun juga memiliki posisi strategiskarena dapat mempengaruhi

kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial khususnya dalam kepentingan pemilik modal. Selain itu, orang kaya baru dari perkebunan menumbuhkan kepekaan sosial pada penduduk setempat karena lingkungannya yang bertempat tinggal dengan penduduk di perkebunan setempat. Gagasan liberal mendominasi Hindia-Belanda awal abad ke-20 mengembangkan kemajuan negara kolonial modern. Kemajuan modernitas tersebut terwujud dari sumbangan-sumbangan para planters yang juga memiliki kepentingan dengan pemerintah kolonial. Tiga *preanger planters* ternama yaitu Holle, Kerkhoven, dan Bosscha berperan pada lahirnya sumbangan yang turut memajukan sebuah kota kolonial pada berbagai bidang. Oleh karenanya, kehidupan kolonial dapat berkembang ke arah yang lebih modern bagi kepentingan keberlangsungan suatu negara kolonial Hindia-Belanda.

REFERENSI

- Bataviaasch Nieuwsblad. (1897, Mei 14). *Een monument voor Karel Holle*.
- Bataviaasch Nieuwsblad. (1934, April 24). *Bosscha Dag*.
- Berge, T. van den. (1989). *Karel Frederik Holle: Thee planter in Indie 1829–1890*. Bert Bekker.
- Bernard, Ch. (1978). *Sejarah perusahaan-perusahaan teh di Indonesia 1824–1924*. Balai Penelitian Teh dan Kina.
- Breman, J. (2014). *Keuntungan kolonial dari kerja paksa: Sistem Priangan dari tanam paksa kopi di Jawa, 1720–1870*. Yayasan Obor Indonesia.
- Breman, J. (2010). *Kolonial profijt van onvrije arbeid: Het Preanger stelsel van gedwongen koffieteelt op Java* (p. 456). Amsterdam University Press.
- De Indische Courant. (1933, Agustus 6). *Doofstommen Instituut*.
- Departement van Landbouw in Nederlandsch Indie. (1910). [*Laporan tahunan*].
- De Preanger Bode. (1897, Juli 29). *Preanger Telefoon Maatschappij*.
- De Preanger Bode. (1917, November 27). *Bandoengsche Ziekenhuis*.
- Fahmi, D. I. Kiprah karel fraderik holle dalam pusaran budaya sunda abad ke-19 (*Bachelor's thesis*, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Fakih, F. (2023). Colonial domesticity and the modern city: Bandung in the early twentieth-century Netherlands Indies. *Journal of Urban History*, 49(3), 645–667. <https://doi.org/10.1177/00961442211015910>.
- Fajria, N. Distribusi Komoditas melalui Sarana Angkutan Kereta Api Buitenzorg-Priangan (1881-1891)

- (*Bachelor's thesis*, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah).
- Fasseur, C. (1991). Purse or principle: Dutch colonial policy in the 1860s and the decline of the cultivation system. *Modern Asian Studies*, 25(1), 33–52.
- Fauzi, W. I., Santosa, A. B., & Yulianti, I. (2022, November). The demographic dynamics of Bandung city in the early 20th century in Haryoto Kunto's view. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1089, No. 1, p. 012046). IOP Publishing.
- Furnivall, J. S. (2010). *Netherlands India: A study of plural economy*. Cambridge University Press.
- Gustaman, B. (2019). Sisilain kehidupan Preanger planters: Dari perburuan hingga gagasan kon-servasi satwa liar. *Jurnal Patanjala*, 11(2), 235–248.
- Hardjasaputra, A. S. (2003). Perubahan sosial di kota Bandung 1810–1906. *Jurnal Sosiohumaniora*, 5(1), 17–31.
- Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indie. (1897, Juni 21). *Nederland Oost Indie*.
- Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indie. (1925, Oktober 24). *Radium*.
- Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indie. (1928, September 27). *Belangrijke Schenking*.
- Holle, K. F. (1867). *Bijdragen tot de geschiedenis der Preanger Regentschappen*. Batavia Genootschap, Kunsten en Wetenschappen.
- Indische Courant*. (1941, Juni 12).
- Lestari, E. I. P., Mudaryanti, T. W., & Muas, R. T. N. M. E. (2024). *Representation of Mooi Indie in nature-based tourism: development of tourism in Bandung from 1925 to 1941. in collective memory, marginality, and spatial politics in urban Indonesia*. (pp. 161-176). Singapore: Springer Nature Singapore.
- Jaarverslag Nederlandsch-Indie Sterrenkundige Vereeniging over 1920–1921.
- Janssen, C. W. (1888). *Karel F. Holle: Wat een Nederlander doen kan in Indie*. J. De Bussy.
- Julaeha, S. (2010). Perkebunan teh di Hindia-Belanda: Studi kasus perkebunan teh Malabar di Pangalengan–Bandung 1930–1934 [*Skripsi*, Universitas Indonesia].
- Locomotive. (1919, Maret 29). *Een Jaarbeurs-Prijsvraag*.
- Kunto, H. (1984). *Wajah Bandoeng tempo doeloe*. PT Granesia.
- Kunto, H. (1986). *Semberbak bunga di Bandung Raya*. PT Granesia.
- Lubis, N. H. (1998). *Kehidupan kaum ménak priangan 1800–1942*. Pusat Informasi Kebudayaan Sunda.
- Mooi Bandoeng. (1934, Juni 12). *Doofstommen Instituut*.
- Moriyama, M. (2005). *Semangat baru: Kolonialisme, budaya cetak, dan kesastraan Sunda abad ke-19*. Gramedia.
- Muhsin Z., M. (2017). Produksi kopi di Priangan pada abad ke-19. *Paramita: Historical Studies Journal*, 27(2), 182–194. <https://doi.org/10.15294/paramita.v27i2.11160>
- Noorduyn, J. (1988). Holle, van der tuuk, and old sundanese epigraphy: the cikajang and kawali inscriptions. *Bulletin de l'École Française d'Extrême-Orient*, 77, 303–314. <http://www.jstor.org/stable/43731356>.
- Nugraha, A. (2022). From sukabumi to amsterdam 1883: sundanese society through parakansalak tea plantation exposition. *THE SPIRIT OF SOCIETY JOURNAL: International Journal of Society Development and Engagement*, 6(1), 82-93. <https://doi.org/10.29138/scj.v6i1.1726>
- Rachman, T. (2011). Kebijakan pemerintah Hindia-Belanda terhadap tuna netra di Jawa 1901–1942 [*Skripsi*, Universitas Padjadjaran].
- Rachmayanti, S., Roesli, C., & Savitri, M. A. (2017). Konservasi bangunan bergaya art deco di kota Bandung (Studi Kasus: Hotel Preanger dan Hotel Savoy Homann). *Jurnal Dimensi Seni Rupa dan Desain*, 14(1), 83-100. <https://doi.org/10.25105/dim.v14i1.2329>
- Ratnawati, T. (1990). Perusahaan teh swasta di wilayah Priangan: Pengaruhnya terhadap mobilitas sosial ekonomi masyarakat (1862–1940) [*Skripsi*, Universitas Padjadjaran].
- Rotterdamsche Nieuwsblad. (1928, Desember 28). *K.A.R Bosscha: Eereburger van Indië*.
- Sakri, A. (Ed.). (1975). *Dari TH ke ITB*. Penerbit ITB.
- Sholeha, A. (2024). Peran Karel Albert Rudolf Bosscha dalam pengelolaan perkebunan teh malabar pangalengan tahun 1896-1928 (*Doctoral dissertation*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Staatsblad voor Nederlandsch Indie No. 218. (1921).
- Suganda, H. (2014). *Kisah para preanger planters*. Kompas.
- Ukers, W. H. (1935). *All about tea*. Kingsport Press, Inc.
- van der Meer, A. H. (2017). Performing colonial modernity: Fairs, consumerism, and the emergence of the Indonesian middle classes. *Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde /Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 173(4), 503–538. <https://doi.org/10.1163/22134379-17304015>

- Vereeniging “Nederlandsch-Indie” Jaarbeurs. (1920). *1e Nederland Indische Jaarbeurs te Bandoeng van 17 Mei tot en Met 17 Juni 1920*. Boek, Kunst, en Handelsdrukkerij J.D. De Boer.
- Verslag van de Plegtige Opening Kweekschool voor Inlandsche Onderwijzers te Bandong. (1867, Mei 25). *Ter Lands Drukkerij*.
- Vlekke, B. H. M. (2008). *Nusantara: Sejarah indonesia*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Wulan, R. R. (2016, March). Colonial mechanism on plantation organization: case study of women worker marginalization in west java plantation. *In 3rd International Seminar and Conference on Learning Organization* (pp. 230-234). Atlantis Press. 10.2991/iscl-15.2016.42.
- Zuhriyyah, M. (2020). Aktivitas organisasi pekerja industri gula “suikerbond” di jawa tahun 1907-1942 (*Doctoral dissertation*, UNIVERSITAS AIRLANGGA).